



Penerapan Akuntansi Sektor Publik Berbasis *Online* pada Kelurahan Menur Pumpungan Kota Surabaya

Muhammad Aqiil Fahreza Yofiansyah

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Dimas Prayudha Anggoro

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Muhammad Rafi Faisal

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Dipta Wira Hanggara

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan

Nasional “Veteran” Jawa Timur

Jl. Rungkut Madya, Gn. Anyar, Kec. Gn Anyar, Surabaya, Jawa Timur 60294.

Korespondensi penulis: 21013010314@student.upnjatim.ac.id

Abstrak. *This research analyzes public sector budget management in Menur Pumpungan Subdistrict, Surabaya City, with a focus on planning, allocation and use of budgets at the subdistrict level. The method used is descriptive qualitative with data collection through interviews, observation and documentation. The research results show that the budget preparation process in Menur Pumpungan Subdistrict is carried out systematically through the Development Planning Conference (Musrenbang), which involves active community participation. Implementation of budget policy in accordance with Minister of Home Affairs Regulation no. 64 of 2020, with emphasis on the principles of transparency, accountability and effective use of funds. This research also found several obstacles in implementation, such as limited resources and coordination challenges, and recommended strengthening information systems and apparatus capacity to increase budget effectiveness. It is hoped that these findings can contribute to improving the quality of public financial management at the sub-district level in order to achieve more optimal development and community welfare*

Keywords: *Public Sector Accounting, Budgeting, Government Budget*

Abstrak. Penelitian ini menganalisis pengelolaan anggaran sektor publik di Kelurahan Menur Pumpungan, Kota Surabaya, dengan fokus pada perencanaan, alokasi, dan penggunaan anggaran di tingkat kelurahan. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyusunan anggaran di Kelurahan Menur Pumpungan dilakukan secara sistematis melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Implementasi kebijakan anggaran sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2020, dengan penekanan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penggunaan dana. Penelitian ini juga menemukan beberapa kendala dalam pelaksanaan, seperti keterbatasan sumber daya dan tantangan koordinasi, serta merekomendasikan penguatan sistem informasi dan kapasitas aparatur untuk meningkatkan efektivitas anggaran. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas pengelolaan keuangan publik di tingkat kelurahan dalam rangka mencapai pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih optimal

Kata Kunci: Akuntansi Sektor Publik, Penganggaran, Anggaran Pemerintah

PENDAHULUAN

Penganggaran sektor publik berkembang dan berubah mengikuti dinamika perkembangan manajemen sektor publik serta kebutuhan yang muncul dari masyarakat. Dalam konteks negara sebagai suatu organisasi, sistem penganggaran berfungsi sebagai

alat untuk mendistribusikan sumber daya berupa barang dan jasa yang tersedia kepada masyarakat (Oktaverina et al., 2019). Instansi-instansi adalah sarana yang dibentuk oleh pemerintah untuk menjalankan tugas-tugas tertentu dalam menangani urusan pemerintahan. Selain itu, instansi juga berfungsi sebagai alat untuk memastikan bahwa misi atau rencana dapat terlaksana dengan baik, sehingga tujuan negara dapat tercapai dengan sempurna. Hasil dari kegiatan instansi pemerintah dalam menjalankan tugas-tugas sesuai wilayah yang dipercayakan dapat dilaporkan melalui informasi kinerja masing-masing instansi. Pemerintah memerlukan informasi ini untuk menilai akuntabilitas kinerja instansi, yang menjadi dasar dalam mengambil keputusan guna meningkatkan administrasi dan menyeimbangkan kepentingan operasional pemerintahan (Costari & Belinda, 2021).

Anggaran, sebagai tulang punggung setiap organisasi, menjadi instrumen vital dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan. Dalam konteks pemerintahan daerah, khususnya di tingkat kelurahan, anggaran berperan sebagai alat untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Penelitian ini berfokus pada analisis mendalam terhadap proses penyusunan dan pelaksanaan anggaran di Kelurahan Menur Pumpungan, Kota Surabaya (Oktaverina et al., 2019).

Kelurahan, sebagai unit pemerintahan terkecil, memiliki peran strategis dalam menjembatani antara pemerintah dan masyarakat. Melalui anggaran, kelurahan dapat mengalokasikan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di tingkat lokal, seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana proses penganggaran di tingkat kelurahan berjalan, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan dan pertanggungjawaban (Kurniati et al., 2024).

Penggunaan dana dalam pengelolaan anggaran juga harus dikelola dengan cermat dan teliti tujuannya yaitu untuk memastikan bahwa dana tersebut benar-benar dialokasikan pada program-program dan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan fasilitas umum yang diadakan oleh kelurahan yang mana sesuai dengan keluhan masyarakat yang disampaikan melalui Musyawarah Pembangunan Kelurahan (Musbangkel). Alokasi dana yang tepat dapat memastikan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana publik pada suatu kegiatan serta mendorong tercapainya pembangunan yang diinginkan (Abdullah & Sari, 2017).

Dengan demikian, pengelolaan anggaran sektor publik merupakan sektor penting dalam mendukung berjalanya pembangunan yang diadakan oleh kelurahan menur pumpungan. Alokasi dana yang tepat, pemantauan anggaran yang tepat, dan juga pelaksanaan anggaran yang transparan akan meningkatkan proses pelaksanaan kegiatan yang efektif dan berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, peran dan tanggung jawab dalam pengelolaan anggaran sektor publik harus dilakukan dengan penuh kesadaran dan integritas demi kepentingan bersama yang terkhusus di kampung menur pumpungan (Septiani et al., 2022).

KAJIAN TEORI

Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi Sektor Publik adalah sistem akuntansi yang digunakan oleh organisasi publik untuk melaporkan informasi kepada masyarakat. Saat ini, praktik akuntansi di lembaga-lembaga publik, termasuk oleh akuntan sektor publik atau LSM, semakin menjadi sorotan. Lembaga publik menghadapi tekanan dari masyarakat untuk menjalankan pemerintahan secara transparan dan akuntabel.

Akuntansi sektor publik adalah proses mengidentifikasi, mengukur, mencatat, dan melaporkan transaksi keuangan oleh instansi pemerintah daerah untuk mendukung pengambilan keputusan ekonomi yang bermanfaat bagi semua pihak di luar instansi tersebut. Akuntansi sektor publik berfungsi sebagai teknik dan mekanisme analisis yang diterapkan dalam pengelolaan dana publik di berbagai tingkat lembaga negara, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan, lembaga pemerintah, industri publik, organisasi bisnis, LSM, organisasi masyarakat sipil, serta proyek kerjasama antara sektor publik dan swasta.

Pengertian Anggaran

Anggaran merupakan rencana keuangan yang disusun untuk mengatur pemasukan dan pengeluaran dalam jangka waktu tertentu. Anggaran disusun untuk memprediksi dan mengontrol arus keuangan, serta memastikan bahwa dana yang tersedia digunakan secara efisien dan sesuai dengan tujuan organisasi, perusahaan, atau pemerintah. Secara umum, anggaran berfungsi sebagai alat perencanaan, pengawasan, dan evaluasi (Armono & Widiyaningsih, 2023).

Anggaran Pemerintah

Anggaran pemerintah adalah rencana keuangan yang dirancang dan dikelola oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu, biasanya setahun. Anggaran ini mencakup perkiraan pendapatan dan pengeluaran negara yang dialokasikan untuk mendanai berbagai program dan aktivitas pemerintah, seperti pembangunan infrastruktur, layanan publik, kesehatan, pendidikan, serta pertahanan dan keamanan. Menurut (Korompot & Poputra, 2015) anggaran merupakan perkiraan pencapaian dalam periode tertentu yang dinyatakan dalam nilai finansial. Dalam akuntansi, anggaran termasuk dalam area akuntansi manajemen. Beberapa fungsi anggaran dalam manajemen organisasi sektor publik sebagai berikut:

1. Anggaran sebagai alat perencanaan
2. Anggaran sebagai alat pengendalian
3. Anggaran sebagai alat kebijakan
4. Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi
5. Anggaran sebagai alat penilaian kinerja
6. Anggaran sebagai alat motivasi

Kegunaan dan Keterbatasan Anggaran

Kegunaan anggaran adalah sebagai alat penilaian kinerja, artinya anggaran berfungsi sebagai tolok ukur yang dapat digunakan untuk menilai apakah suatu unit kerja telah mencapai target, baik dalam pelaksanaan aktivitas maupun efisiensi biaya. selanjutnya salah satu contoh keterbatasan anggaran yaitu keterbatasan sumber daya. Anggaran pemerintah selalu memiliki batasan, sehingga tidak semua program atau proyek dapat dibiayai sepenuhnya. Ini memaksa pemerintah untuk melakukan prioritas yang mungkin tidak selalu memenuhi kebutuhan masyarakat secara keseluruhan.

METODE PENELITIAN

Objek Penelitian

Penelitian mengenai anggaran sektor publik di Kelurahan Menur Pumpungan, Kota Surabaya, berfokus pada pengelolaan, alokasi, dan penggunaan anggaran di tingkat kelurahan. Objek penelitian ini mencakup beberapa aspek utama, termasuk proses penyusunan anggaran, yang meneliti prosedur perencanaan, pengajuan, dan persetujuan anggaran oleh pihak-pihak terkait. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji bagaimana

anggaran dialokasikan untuk berbagai sektor, seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan masyarakat, dan kegiatan sosial ekonomi yang mendukung kesejahteraan warga. Penelitian ini juga mengevaluasi efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, dengan melihat apakah dana yang dikeluarkan berhasil mencapai tujuan program yang telah ditetapkan. Selain itu, aspek tata kelola keuangan menjadi perhatian penting dalam penelitian ini, untuk menilai transparansi, akuntabilitas, serta mekanisme pengawasan dan pelaporan dalam pengelolaan keuangan publik. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memahami peran anggaran sektor publik dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan pembangunan di masyarakat serta memastikan pengelolaan keuangan yang baik di tingkat kelurahan.

Subjek Penelitian

Dalam penelitian mengenai anggaran sektor publik di Kelurahan Menur Pumpungan, Kota Surabaya, fokus subjek penelitian adalah anggota kelurahan yang terlibat langsung dalam pengelolaan anggaran. Ini termasuk lurah, sekretaris kelurahan, dan staf lainnya yang bertanggung jawab dalam menyusun, mengelola, dan melaksanakan anggaran. Mereka memainkan peran penting dalam menentukan bagaimana anggaran dialokasikan untuk berbagai program dan kegiatan di kelurahan, serta memastikan penggunaan anggaran tersebut sesuai dengan rencana dan kebutuhan masyarakat. Selain itu, anggota kelurahan juga berperan dalam memantau dan mengevaluasi sejauh mana dana publik digunakan secara efektif untuk meningkatkan kesejahteraan warga.

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif yang mengambil data dari Kelurahan Menur Pumpungan. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang fenomena yang terjadi di kelurahan tersebut dengan menggali data yang kaya dari pengalaman, persepsi, dan pandangan responden. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan fokus pada penggambaran kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang relevan. Pemilihan metode ini bertujuan untuk menghasilkan deskripsi yang komprehensif mengenai situasi di Kelurahan Menur Pumpungan, sehingga dapat memberikan wawasan yang jelas dan faktual tentang topik penelitian.

Metode Pengumpulan Data

Wawancara

Wawancara atau sering dikenal dengan istilah Interview adalah percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara yang berisikan tanya jawab yang tujuannya untuk mendapatkan sebuah informasi.

Observasi

Observasi merupakan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian yang berupa tempat peristiwa.

Dokumentasi

Dokumen merupakan pengumpulan, menyusun, dan mengelola dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian tentang penyusunan anggaran, dokumen digunakan sebagai sumber data yang dapat mendukung data wawancara dan Observasi.

Metode Analisis Data

Analisis data adalah sebuah proses untuk mencari dan menyusun data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi secara sistematis. Data ini diorganisasikan secara sintesis, diatur ke dalam pola, dipilih sesuai tingkat kepentingan, dan diambil kesimpulannya agar dapat dipahami dengan mudah oleh diri sendiri maupun orang lain. Peneliti memperoleh data secara langsung dari subjek penelitian melalui wawancara tanpa struktur formal, artinya data diperoleh dengan wawancara langsung tanpa memberikan draft pertanyaan pada objek wawancara. Setelah wawancara selesai, analisis data dimulai dengan membuat transkrip dari hasil wawancara, yaitu dengan memutar rekaman, mendengarkan dengan cermat, dan menuliskan kata demi kata yang terdengar sesuai rekaman. Proses ini dilakukan agar peneliti benar-benar memahami data yang telah diperoleh. Hasil wawancara dalam penelitian ini kemudian diatur secara sistematis untuk memudahkan peneliti dalam menganalisis data lebih mendalam.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kelurahan Menur Pumpungan, proses perencanaan anggaran dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang sistematis dan terstruktur. Tahapan ini dimulai dengan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat kelurahan yang diselenggarakan pada bulan Januari. Musrenbang ini menjadi forum utama untuk menggali aspirasi masyarakat

melalui dialog antara berbagai kelompok masyarakat, termasuk kelompok tertentu yang diberikan kesempatan untuk menyuarakan kebutuhan mereka.

Proses perencanaan anggaran di Kelurahan Menur Pumpungan menunjukkan komitmen terhadap prinsip partisipatif, di mana usulan kegiatan dihimpun dari tingkat RT melalui RW dan lembaga-lembaga tingkat kelurahan. Tim Penyusun RPJM Kelurahan kemudian mengorganisir usulan-usulan tersebut dengan mempertimbangkan aspek fisik dan non-fisik, serta lokasi pelaksanaan kegiatan. Dalam implementasi kebijakan anggaran, Kelurahan Menur Pumpungan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Implementasi ini mencakup beberapa aspek penting:

1. Penetapan Prioritas:

- Penentuan program prioritas berdasarkan hasil Musrenbang
- Penyesuaian program dengan kebutuhan masyarakat
- Alokasi anggaran sesuai dengan urgensi program

2. Pengajuan dan Pengelolaan Dana:

- Proses pencairan anggaran melalui bank
- Pengelolaan oleh PJOK (Pengelola Keuangan)
- Pertanggungjawaban penggunaan dana kepada masyarakat

3. Monitoring dan Evaluasi:

- Pengawasan berkelanjutan terhadap penggunaan anggaran
- Evaluasi pencapaian target program
- Penyesuaian strategi implementasi bila diperlukan

Mekanisme Pertanggungjawaban

Kelurahan Menur Pumpungan menerapkan sistem pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel. Mekanisme ini meliputi:

Pelaporan Keuangan:

- Penyusunan laporan pertanggungjawaban di akhir tahun
- Dokumentasi bukti-bukti penggunaan anggaran
- Transparansi penggunaan dana kepada masyarakat

Sistem Pengawasan:

- Pengawasan internal oleh tim kelurahan
- Monitoring dari tingkat kecamatan

- Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan program

Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pencapaian Target Program Evaluasi efektivitas pengelolaan anggaran di Kelurahan Menur Pumpungan dapat dilihat dari beberapa indikator:

Kesesuaian dengan Rencana:

- Tingkat pencapaian program yang telah direncanakan
- Ketepatan waktu pelaksanaan program
- Efisiensi penggunaan anggaran

Manfaat bagi Masyarakat:

- Dampak langsung program terhadap kesejahteraan warga
- Tingkat kepuasan masyarakat
- Keberlanjutan program yang telah dilaksanakan

Kendala dan Solusi

Dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran, beberapa kendala yang dihadapi antara lain:

Keterbatasan Sumber Daya:

- Keterbatasan anggaran untuk memenuhi semua usulan program.
- Perlunya prioritas program yang ketat
- Optimalisasi penggunaan anggaran yang tersedia

Koordinasi Antar Pihak:

- Tantangan dalam menyelaraskan berbagai kepentingan
- Kebutuhan komunikasi yang intensif
- Pentingnya sistem koordinasi yang efektif

Rekomendasi Pengembangan Peningkatan Sistem Pengelolaan Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran, beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan:

1. Penguatan Sistem Informasi:

- Implementasi sistem informasi terintegrasi
- Peningkatan transparansi melalui teknologi
- Kemudahan akses informasi bagi masyarakat

2. Pengembangan Kapasitas:

- Pelatihan staf pengelola anggaran
- Peningkatan pemahaman prosedur keuangan
- Penguatan sistem monitoring dan evaluasi

Optimalisasi Partisipasi Masyarakat Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan anggaran:

1. Penguatan Forum Participatif:

- Peningkatan kualitas Musrenbang
- Pemberdayaan kelompok masyarakat
- Penguatan mekanisme feedback

2. Edukasi Masyarakat:

- Sosialisasi program dan anggaran
- Peningkatan pemahaman proses penganggaran
- Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penyusunan anggaran sektor publik di Kelurahan Menur Pumpungan, dapat disimpulkan bahwa proses penyusunan anggaran telah dilaksanakan secara sistematis dan terstruktur melalui mekanisme Musrenbang yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2020. Implementasi kebijakan anggaran dilakukan dengan memperhatikan aspek prioritas program dan efisiensi penggunaan dana, didukung oleh sistem pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel melalui pelaporan berkala kepada masyarakat. Meskipun pelaksanaan program-program yang dianggarkan telah memberikan dampak positif bagi masyarakat, masih terdapat tantangan berupa keterbatasan sumber daya dan koordinasi antar pihak yang perlu ditingkatkan. Keterlibatan berbagai elemen masyarakat, termasuk kelompok perempuan dan lembaga tingkat kelurahan, mencerminkan pendekatan inklusif dalam pengelolaan anggaran publik, namun masih diperlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran melalui penguatan sistem informasi, peningkatan kapasitas aparatur, dan optimalisasi partisipasi masyarakat guna mencapai tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yang optimal

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, I., & Sari, R. A. (2017). Analisis Fungsi Anggaran Sebagai Alat Pengawasan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Kecamatan Medan Denai. *Kumpulan Jurnal Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, 4(1), 46–47.

- Armono, D., & Widiyaningsih, N. (2023). Analisis Efisiensi dan Efektivitas Realisasi Anggaran Belanja pada Dinas Koperasi, UMK, UM dan Perindustrian Kota Metro Tahun Anggaran 2017-2020. *Jurnal Aplikasi Bisnis*, 20(1), 323–331.
- Costari, N., & Belinda, P. A. (2021). Pentingnya Implementasi Akuntansi Sektor Publik Dalam Suatu Instansi Pemerintahan. *Jamanta: Jurnal Mahasiswa Akuntansi Unita*, 1(1), 58–77.
- Korompot, R., & Poputra, A. T. (2015). analisis penyusunan anggaran pada dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah kota kotamobagu tahun anggaran 2014. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(1).
- Kurniati, I. P., Siboro, S. F., & Angeli, M. (2024). Peran Akuntansi Sektor Publik dalam Perencanaan Anggaran pada Kinerja Keuangan Daerah Kota Depok Tahun 2022. *Akuntansi*, 3(2), 150–155.
- Oktaverina, C., Kurniawan, M. F., Rachma, I. N. A., & Prawira, I. F. A. (2019). Perkembangan Sistem Dan Teknik Penganggaran Sektor Publik Berbasis Kinerja. *Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan)*, 4(1), 21–28.
- Septiani, S., Defitri, S. Y., & Sukraini, J. (2022). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah:(Studi Empiris Pada OPD Kabupaten Solok). *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen*, 1(3), 83–102.